

# PERGESERAN IDEOLOGI AL-IKHWÂN AL-MUSLIMÛN DARI ISLAM FUNDAMENTALIS MENJADI ISLAM MODERAT

Nurul Huda

Institut Agama Islam Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia

E-mail: kaconghuda@gmail.com

**Abstract:** The reform in Egypt was originally considered as the end of the Islamic political system and replaced by the democratic system. However, after *Ḥizb al-Ḥurrīyah wa al-‘Adâlah* (Freedom and Justice Party) in Egypt was able to win the election and wiped out two of the most strategic positions, i.e. the speakerman of parliament and the president, it should be admitted that the Islamic political system has never ceased. There is a new fact that the Arab nations, especially Egypt, began to accept the democratic system without having to necessarily remove the role of Islam from it. Collaboration and integration between Islam and democracy is what has been introduced in Egypt today. Islamic system of democracy which is introduced in Egypt becomes the new hallmark of the Islamic movement or more precisely what so-called moderate Islam. Al-Ikhwân al-Muslimûn (IM) is a religious organization that is worthy of being a representation of the moderate Islamic forces today. It has managed to get out of the mode of fanaticism and conservatism (fundamentalist) toward adaptive patterns of thought and compromise. This study focuses on the factors and measures of IM changes from fundamentalist Islam to moderate Islam. This study concludes that IM’s ideological changes were driven by several factors, such as the role of the figure, government’s treatment, social condition, and human resources organization.

**Keywords:** Ideological changes, democracy, the Islamic movement, conservatism.

## Pendahuluan

Kemunculan al-Ikhwân al-Muslimûn—selanjutnya disingkat IM—sebagai organisasi trans-nasional pertama yang berasaskan Islam merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam kala itu. IM memandang bahwa kemunduran umat Islam

dalam segala aspek kehidupan disebabkan Islam tidak lagi sebagai pedoman hidup khususnya dalam berbangsa dan bernegara. Tradisi-tradisi Islam dipandang sedang terancam dan semakin terkikis dari waktu ke waktu digantikan tradisi-tradisi Barat yang semakin dominan. Kehadiran negara-negara kolonialis Eropa benar-benar mampu memporandakan benteng-benteng tradisi Islam yang sejak dulu dibangga-banggakan.

IM merasa bertanggungjawab untuk mengembalikan umat Islam ke posisi semula, yaitu masyarakat yang secara politik berada dalam naungan sistem *khilāfah* dan shari'ah sebagai legislasinya. Tidak heran bila visi perjuangan IM lebih berorientasi politis, yaitu membebaskan negara-negara Arab dari kekuatan asing dan mendirikan negara Islam.<sup>1</sup> Ketidakpercayaan IM terhadap tradisi-tradisi Barat, menjadikan ia memilih strategi gerakan oposisi di luar sistem politik Mesir yang saat itu menerapkan tradisi politik Barat. Sebagai konsekuensinya, IM selalu mengalami benturan dengan pemerintah yang mengakibatkan organisasi ini, berjalan tidak linear.

Perjuangan IM untuk sampai pada kesuksesan saat ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan berliku. Berbagai tindakan represif yang bertubi-tubi dari rezim yang berkuasa, hukuman penjara sampai hukuman mati telah dilaluinya. Tindakan-tindakan keras yang dilakukan pemerintah terjadi tidak semata-mata karena kekhawatiran terhadap gerakan IM yang dinilai mengancam stabilitas negara, tetapi juga karena peran asing yang menjadikan fundamentalisme Islam pasca-perang dunia kedua dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas dunia.

Di samping itu prinsip-prinsip yang dianut dan pola gerakan yang dilakukan oleh organisasi IM sedikit banyak juga membenarkan stigma buruk masyarakat seperti label fundamentalis, militan, konservatif, atau bahkan teroris. Sikap IM yang tidak mau kompromi dengan sistem kenegaraan modern dan tindakan-tindakan anarkis yang mewarnai gerakan IM, menjadi dasar munculnya pandangan miring tersebut. Akibatnya, perjalanan organisasi ini dilalui dengan jatuh-bangun sampai akhirnya terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam diri IM terkait strategi dan prinsip-prinsip perjuangannya hingga disebut kelompok moderat. Perubahan-perubahan inilah yang ternyata mengantarkan IM

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qardhawi, *70 Tahun Ikhwan Muslimin: Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah, dan Jihad*, terj. Mustolah Maufur (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 85-86.

berhasil menjadi penguasa Mesir. Keberhasilan ini tentu saja adalah sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai oleh IM di masa-masa yang lalu.

Keberhasilan IM dalam menduduki pemerintahan Mesir pasca-demonstrasi tahun 2011, masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan besar dari beberapa pengamat, karena keberhasilannya masih sebatas kekuasaan politik. Pertanyaan seperti, apakah sistem negara Islam yang berwatak demokratis dapat menyejahterakan rakyat dan membawa negara Mesir menjadi negara kuat dan maju”, dan pertanyaan bagaimana dampak keberhasilan IM pada organisasi-organisasi Islam fundamentalis, baik di Mesir maupun di negara-negara yang lain, merupakan pertanyaan yang terus ditunggu jawabannya. Hanya saja fokus penelitian ini tidak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena jawaban tersebut mungkin lebih tepat untuk Mesir di masa-masa yang akan datang.

### **Sejarah Berdirinya al-Ikhwân al-Muslimûn**

Organisasi al-Ikhwân al-Muslimûn pertama kali didirikan oleh Hasan al-Bannâ, bersama murid-muridnya di Ismaîliyah. Al-Bannâ sendiri dilahirkan pada tahun 1906 di desa al-Maḥmûdiyyah, salah satu desa di wilayah al-Buḥayrah Mesir,<sup>2</sup> yaitu di muara sungai Nil sembilan puluh mil sebelah Barat laut Kairo.<sup>3</sup> Masa kecil al-Bannâ dididik langsung oleh ayahnya bernama Aḥmad ‘Abd al-Raḥmân al-Bannâ yang lebih dikenal dengan nama al-Sâ‘atî, seorang guru fiqh, tauhid, dan nahwu. Sang ayah pernah belajar pada Muḥammad ‘Abduh di al-Azhar dan sempat menulis beberapa karya ilmiah di bidang ḥadîth, fiqh, dan tasawuf.<sup>4</sup> Keulamaan ayah Hasan dikenal di bidang ḥadîth.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu* terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, Vol 1, 1997), 23.

<sup>3</sup> Imam Ghazali Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis: Pengaruh Pemikiran Politik al-Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan-Mesir* (Surabaya: Diantama, 2003), 152.

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal dkk, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 189.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 189.

Ismâîlyah adalah tempat al-Bannâ ditugaskan menjadi guru SD setelah lulus dari Universitas Darul Ulum Kairo pada tahun 1927.<sup>6</sup> Selain mengajar, ia juga rajin berdakwah di warung-warung kopi dan masjid. Ia dikenal mempunyai cara dan teknik yang menarik dalam menyampaikan dakwahnya, sehingga siapapun yang mendengarnya, baik di masjid atau di warung kopi akan terkesan.<sup>7</sup> Dengan kelebihan itu ditambah modal pengalaman yang didapatkan di Kairo, dalam waktu cepat al-Bannâ dapat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bahkan banyak orang minta belajar secara intensif kepada al-Bannâ.<sup>8</sup>

Sedangkan IM terbentuk pada bulan Maret 1928 bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah 1346 H.<sup>9</sup> Pembentukan awal ini hanya melibatkan 6 orang muridnya yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik Inggris, yakni: Ḥâfiz 'Abd al-Ḥâmid, Aḥmad al-Ḥasrî, Fu'âd Ibrâhîm, Abd al-Raḥmân Ḥasb Allâh, Ismâîl 'Îz, dan Zakî al-Maghribî. Keenam orang ini datang menemui al-Bannâ dan menjelaskan ketertarikannya terhadap dakwah yang dilakukan al-Bannâ. Kemudian mereka berbaiat untuk menjadi "tentara Dakwah Islam" demi kejayaan tanah air dan kebangkitan bangsa.<sup>10</sup>

Pemberian nama IM juga muncul pada dialog yang melibatkan keenam orang tersebut. Hal ini bermula ketika salah satu dari mereka mengusulkan nama perkumpulan yang telah dibentuknya. Jawaban al-Bannâ adalah, "tinggalkan lambang resmi itu, yang penting dalam pertemuan pertama ini adalah ide, arti, dan pendek, kita semua ini bersaudara untuk mengabdikan kepada Islam, jadi kita ini 'al-Ikhwân al-Muslimûn'."<sup>11</sup> Dari sinilah kemudian organisasi ini dikenal dengan

---

<sup>6</sup> Mahmud, *Ikhwanul Muslimin*, 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 24.

<sup>8</sup> Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, 194.

<sup>9</sup> Mengenai tahun hijriyah pada bulan Maret 1928 terdapat perbedaan. Yûsuf al-Qarḍâwî yang meyebut tahun tersebut bersamaan dengan Zulqa'dah 1347. Al-Qarḍhawî, *70 Tahun Ikhwan Muslimin*, 49. Tetapi menurut Ali Abdul Halim Mahmud pendapat tersebut salah. Setelah dilihat dalam kalender ternyata menurut Mahmud bulan Maret tahun 1928 itu bertepatan dengan Zulqa'dah 1346. Karena tahun 1347 baru di mulai pada bulan 20 Juni 1928, sedangkan al-Banna sendiri mengatakan berdirinya IM pada Maret 1928. Mahmud, *Ikhwanul Muslimin*, 25.

<sup>10</sup> Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 155-156.

<sup>11</sup> *Ibid.*

nama al-Ikhwân al-Muslimûn yang pada waktu itu berkantor pusat di Ismaîlyah.

Kemampuan al-Banna sebagai seorang organisator yang baik dan seorang dai yang lincah, bersemangat, mempunyai kepribadian yang sangat menarik bagi siapapun yang berhubungan dengannya,<sup>12</sup> dan mampu membawa IM ini berkembang dengan pesat. Hanya dalam waktu kurang dari tiga tahun, IM telah mampu membeli sebidang tanah dan membangun markas IM yang terdiri dari satu masjid dan dua sekolah; satu untuk putra dan satunya lagi untuk putri.<sup>13</sup> Pada waktu ini juga organisasi IM sudah memiliki struktur majelis umum lengkap dengan dewan pengurusnya.

Perkembangan IM semakin pesat, di saat al-Bannâ kembali ke Kairo pada tahun 1930. Kepindahan ini diikuti dengan perpindahan kantor pusat IM ke Kairo, sedangkan di Ismaîlyah masih berjalan sebagaimana biasanya. Kepindahan ini memudahkan al-Bannâ untuk menjadikan IM sebagai organisasi nasional. Karena Kairo tidak hanya kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, malainkan sebagai ibu kota.

Di tempat tinggal yang baru tersebut, hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, IM menjelma menjadi organisasi yang besar dan berpengaruh. Dari tahun 1929 sampai tahun 1932, IM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Organisasi IM telah mempunyai 5 kantor cabang di tahun 1930 dan menjadi 300 kantor cabang pada tahun 1938. Sedangkan jumlah anggota IM menurut Mitchell tidak diketahui secara pasti, berkisar antara 50.000 sampai 150.000.<sup>14</sup> Jumlah ini terus bertambah sampai menembus 500.000 anggota dan mempunyai 1000 cabang yang tersebar di seluruh Mesir.<sup>15</sup> Para anggotanya meliputi semua lapisan masyarakat, dari pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, guru, arsitek, insinyur, dokter, akuntan, sampai

---

<sup>12</sup> Ibid., 157.

<sup>13</sup> Mahmud, *Ikhwanul Muslimin*, 26.

<sup>14</sup> Muhammad Zahid, *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East* (London: Tauris Academic Studies, 2010), 72.

<sup>15</sup> Youssef M. Choueiri, *Islamic Fundamentalism* (Boston: A Division of G.K. Hall & Co, 1990), 50.

wartawan.<sup>16</sup> Sepuluh tahun kemudian IM telah mempunyai pers sendiri.<sup>17</sup>

Kesuksesan yang dicapai dengan relatif cepat tersebut, membuat al-Banna mengambil langkah lebih maju dengan menginternasionalisir gerakan IM dengan cara mengirimkan surat kepada perdana menteri, raja, dan penguasa Arab lainnya. Dua tahun kemudian ia menyerukan kepada Mesir untuk membubarkan partai politik karena tindakan korup yang mereka lakukan.<sup>18</sup>

Namun pada saat yang sama, pesatnya perkembangan IM ternyata menarik perhatian banyak pihak yang berkepentingan termasuk partai *al-Wafd* dan kalangan Istana. IM hadir dengan kekuatan yang terorganisir secara rapi dengan membawa slogan “agama”—yang dapat diterima oleh semua aliran keagamaan berupa “pesan *salafiyah*, jalan sunni, kebenaran sufi, organisasi politik, kelompok atletik, mata rantai ilmiah dan budaya, usaha ekonomi dan gagasan sosial”—ternyata menimbulkan kekhawatiran imperialis Inggris.

Kekhawatiran tersebut sangat nampak ketika pada tahun 1942, al-Bannâ mulai tertarik untuk menjadi anggota parlemen. Keinginan al-Bannâ sontak mendapat reaksi dari al-Nahas Bâsha dengan meminta al-Bannâ untuk tidak melanjutkan niatnya menjadi anggota parlemen. Begitu juga pada tahun 1944, di saat IM berniat untuk bersaing dalam pemilu, ia dihalang-halangi dengan cara memalsukan hasil pemilu, tidak meloloskan calon-calon legislatifnya, dan menangkap tokoh-tokoh IM.<sup>19</sup> Kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa organisasi IM yang dikenal kritis terhadap segala kebijakan pemerintah yang pro-Inggris, dianggap sebagai ancaman, lebih-lebih bila terlibat dalam suksesi pemilu. Apalagi secara ideologis, IM dengan pemerintah yang berkuasa memang berbeda.

Ketertarikan IM untuk terjun ke ranah Politik lebih didasarkan semata-mata karena cita-cita IM untuk menegakkan pemerintahan Islam dan menghapus negara sekuler. Al-Bannâ seakan menyadari bahwa tujuan mendirikan pemerintahan Islam akan mudah tercapai, bila IM berada dalam sistem pemerintahan. Maka, untuk mencapai

---

<sup>16</sup> Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 158.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Iqbal dkk., *Pemikiran Politik Islam*, 195.

<sup>19</sup> Mahmud, *Ikhwanul Muslimin*, 36-37.

tujuan ini, IM setidaknya mempunyai dua program besar, sebagai berikut:

1. Internasionalisasi gerakan yang bertujuan untuk membebaskan Mesir dan negara-negara Arab lainnya dari penjajah. IM secara esensial memperjuangkan Mesir dan Sudan serta tetangga-tetangga mereka yang berbasis kesatuan geografis dan Nasional Lembah Nil.<sup>20</sup>
2. Menegakkan pemerintahan Islam yang merdeka di tanah air tersebut dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Islam, menerapkan sistem sosialnya, dan menerapkan landasan yang kokoh.<sup>21</sup>

Untuk menyukseskan program-programnya, salah satu jalan yang paling efektif adalah dengan terjun dalam politik praktis. Tetapi jalan politik ini ternyata gagal, karena IM tidak dikehendaki oleh pemerintah dan kolonial Inggris. Akhirnya jalan satu-satunya adalah membentuk “Unit Khusus” atau “Organisasi Khusus” bersifat rahasia yang ditugaskan untuk berjihad. Unit khusus ini mendapatkan doktrin langsung dari al-Bannâ sehingga mempunyai loyalitas yang tinggi, dan juga dibekali dengan keterampilan menggunakan senjata api. Dalam usahanya untuk membangun loyalitas yang tinggi, al-Banna meniru sistem ketaatan murid tarekat kepada mursidnya.<sup>22</sup>

Tetapi pada perkembangannya, unit khusus ini memiliki peraturan rekrutmen dan intruksi tersendiri yang dalam banyak hal menjadi sebuah entitas yang terlepas dari induknya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakan ‘Abd al-Rahmân al-Sindi sebagai pemimpin unit khusus, seringkali menentang perintah-perintah pemimpin besarnya, dan melakukan beberapa kali pembunuhan politik.<sup>23</sup> Kenyataan ini mulai mengubah gerakan IM yang semula lebih lentur kemudian lebih kental dengan aktivisme politik.

Hal itu diperparah dengan meletusnya perang dunia kedua yang berdampak serius terhadap ekonomi dan politik di Mesir. Kehadiran Inggris yang sangat berkepentingan dalam perang dunia kedua melawan Jerman, menyebabkan resistensi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan politik dan pembunuhan oleh berbagai kelompok selama

---

<sup>20</sup> Choueiri, *Islamic Fundamentalism*, 48-49.

<sup>21</sup> Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 160.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>23</sup> Choueiri, *Islamic Fundamentalism*, 49.

dekade 1930-an dan 1940-an. Antara 1937 dan 1942 sejumlah kelompok muncul dalam serangan terhadap kamp militer Inggris di Mesir.<sup>24</sup>

Persoalan lain adalah krisis Palestina dengan masuknya Israel ke negara tersebut melalui resolusi PBB 1947. Peristiwa ini berimplikasi pada meletusnya perang Arab-Israel yang pertama. IM mengirimkan unit khususnya untuk berjihad di sana dan bekerjasama dengan tentara rahasia Mesir yang dikenal dengan sebutan “Perwira Bebas” (*free Officer*).<sup>25</sup> Kelompok militer ini terdiri dari orang-orang yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah (partai *al-Wafd*) karena dianggap tidak tegas dalam kasus Palestina. Pada Februari 1945 unit khusus terlibat dalam operasi pertama dengan melancarkan serangan terhadap pasukan Inggris di Mesir dan melawan Israel.<sup>26</sup>

Aksi perlawanan yang dilakukan IM, bersamaan dengan meningkatnya kekecewaan kolektif rakyat Mesir terhadap pemerintah. Dalam berbagai aksi kekerasan yang dilakukan rakyat Mesir menunjukkan bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintah, yang dianggap tidak tegas menghadapi Inggris dan Israel. Kondisi yang semakin tidak stabil ini, pemerintah justru menganggap IM sebagai aktor dibalik berbagai aksi kekerasan di Mesir, sehingga semua tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dialamatkan ke IM.<sup>27</sup>

Tuduhan pemerintah semakin mempunyai alasan yang kuat, karena pada saat yang sama unit khusus seringkali bertindak di luar kebijakan organisasi. Mereka terbukti terlibat dalam peledakan bom di perkampungan asing, gedung-gedung bioskop, dan klub malam. Kemudian, respon pemerintah terhadap tindakan unit khusus ini membuat hakim Khazandar menvonis penjara beberapa orang anggota IM yang dinyatakan terbukti melakukan tindak kriminal. Bahkan al-Banna juga ditangkap, tetapi dibebaskan karena terbukti tidak bersalah.<sup>28</sup> Peristiwa ini semakin membuktikan pernyataan Choueiri, bahwa unit khusus sering kali mengambil keputusan yang terlepas dari induknya.

---

<sup>24</sup> Zahid, *The Muslim Brotherhood*, 75.

<sup>25</sup> Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 162-163.

<sup>26</sup> Zahid, *The Muslim Brotherhood*, 76.

<sup>27</sup> Said, *Ideologi Kaum Fundamentalis*, 164.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 165.

Penahanan terhadap beberapa anggota IM tersebut, dibalas oleh unit khusus dengan membunuh Hakim Khazandar.<sup>29</sup> Konflik IM dengan pemerintah nampaknya semakin memanas, sampai akhirnya Maḥmūd Fahmī Nuqrashī Perdana Menteri Mesir membubarkan organisasi IM pada 8 Desember 1948 dan menyatakan IM sebagai organisasi terlarang.<sup>30</sup> Anggota IM menunjukkan kecewaannya terhadap keputusan ini, dengan melakukan percobaan pembunuhan yang gagal kepada Nuqrashī. Tetapi, tindakan ini tidak diakui al-Bannâ sebagai tindakan resmi IM dan malah mengecam mereka bukan anggota IM dan bukan Muslim.<sup>31</sup>

Kecaman al-Bannâ terhadap serentetan aksi kekerasan yang dilakukan beberapa anggota IM sepertinya sudah terlambat. Sikap al-Bannâ ini terbukti tidak bisa mengubah apapun. Karena Ibrâhîm ‘Abd al-Hâdî yang menggantikan Nuqrashī bekerjasama dengan Istana tetap melakukan aksi balas dendam. Al-Bannâ akhirnya ditembak mati oleh agen rahasia pemerintah pada 12 Februari 1949.

Beberapa analis menyebut, bahwa aksi balas dendam dengan sasaran al-Bannâ ini, tidak lepas dari keterlibatan Inggris. Kesetiaan anggota IM kepada figur al-Bannâ sebagai pendiri dan *Murshîd ‘Âm* pertama yang digambarkan menyerupai hubungan murid dan guru dalam tarekat, menjadi salah satu kelemahan utama. Maka, tidak heran bila pemerintah bersama Inggris menjadikan al-Bannâ sebagai sasaran untuk menghancurkan organisasi IM. Terbukti, setelah kematian al-Bannâ, meski IM masih tetap bertahan, tetapi tidak lagi menjadi organisasi yang menonjol.

### **Pergeseran Ideologi al-Ikhwân al-Muslimûn Era Muhammad Badie 2010 hingga Sekarang**

Melalui berbagai tindakan represif pemerintah terhadap aktivitas politik IM selama bertahun-tahun, membuat IM memiliki daya tahan yang semakin kuat. Pada tahun 2000-2011 IM telah menjelma menjadi organisasi sosial yang besar. IM berhasil membangun sebuah infrastruktur ideologis yang kuat dan menciptakan sebuah masyarakat Muslim sebagai fondasinya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan-

---

<sup>29</sup> Zahid, *The Muslim Brotherhood*, 76.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid., 166.

pernyataan IM, bahwa dirinya adalah kelompok anti-perang.<sup>32</sup> Pergeseran ideologi dalam tubuh IM, memperkuat asumsi bahwa gerakan keislaman Mesir lebih bercorak sosial ketimbang gerakan keislaman Iran yang politis. Perbedaan ini biasanya juga digunakan untuk membedakan corak pemikiran dan gerakan antara Sunnî dan Shi'î.<sup>33</sup>

Pada tahun 2010 sebenarnya bisa dikatakan pemerintahan Mubârak sudah berada di ujung tanduk. Kelompok oposisi di Mesir semakin kuat, tidak hanya dari organisasi IM, melainkan dari berbagai kalangan. Kritik terhadap pemerintah semakin berani melalui media massa. Di tahun 2010 ini, pemerintah membungkam surat kabar al-Dustûr dengan memecat Ibrahîm 'Îsâ 2010, karena akan memuat artikel yang ditulis oleh pemimpin oposisi al-Baradai. Sebuah artikel yang dikhawatirkan akan membawa revolusi bagi pemerintah, karena mengangkat kemenangan Mesir atas perang Arab-Israel pada tahun 1973 pada masa Anwar Sadat dan mengkritik pemerintah bahwa Mubârak kemenangan itu tidak ada dalam dirinya.<sup>34</sup>

Meningkatnya kelompok oposisi membuat IM tidak lagi sendiri. Perjuangan IM dengan berbagai pengalaman pahit yang dialami mencapai puncak keberhasilannya bersamaan dengan meluasnya tuntutan reformasi di negara-negara Islam yang diawali di Tunisia. Di Mesir sendiri terjadi pada tanggal 25 Januari 2011. Protes terhadap Mubârak dan pemerintahannya meletus di Kairo dan seluruh Mesir menyerukan pengunduran dirinya. Mubârak berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan menyatakan dalam pidatonya bahwa ia tidak akan pergi, dan akan mati di tanah Mesir. Pernyataan ini ditanggapi oleh pemimpin oposisi Muḥammad al-Baradai sebagai trik yang dirancang Mubârak untuk tetap berkuasa.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Mona al-Ghabashy, *The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers* (United States of America: Cambridge University Press, 2005), 387-390.

<sup>33</sup> Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Millah (Yogyakarta: LKiS, 2011), 86.

<sup>34</sup> David Kenner, "October 2010: The Death of Egypt's Free Press" dalam *Revolution in the Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of an Era* (A Special Report From Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011), 31-32.

<sup>35</sup> Anonim, "Husni Mubarak" dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Hosni\\_Mubarak](http://en.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak) (April 2013).

Mendengar pernyataan Mubârak yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, para demonstran terus melakukan aksinya yang berpusat di Tahrir Square. Pada tanggal 1 Februari 2011, Mubârak mengumumkan bahwa dia tidak akan kembali mengikuti pemilu (menjadi calon presiden) pada bulan September mendatang dan hanya menyelesaikan masa jabatannya saat ini dan menyelesaikan reformasi konstitusi yang dijanjikan.<sup>36</sup> Usaha kompromi dari pemerintah tetap ditolak oleh para demonstran. Mereka tetap menginginkan Mubârak mundur. Demonstrasi ini terus berlanjut sampai terjadi kekerasan di depan Istana Presiden. Melihat para demonstran tidak lagi dapat dikendalikan, maka pada tanggal 11 Pebruari 2011, Wakil Presiden ‘Umar Sulaymân mengumumkan Mubârak telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden dan kekuasaan sementara akan diserahkan kepada militer Mesir.<sup>37</sup>

Hanya dalam waktu 18 hari, revolusi sukses dengan menurunkan Mubârak sebagai presiden Mesir. Tuntutan utama mereka adalah Mubârak mundur dan mencabut Undang-Undang darurat yang melindungi Mubârak berkuasa selama tiga dekade.<sup>38</sup> Demonstrasi yang terjadi sejak akhir Januari sampai awal Februari, dinilai oleh berbagai kalangan adalah pertarungan rakyat dengan pemerintah. Karena demonstrasi yang sangat masif kali ini tidak secara langsung dimobilisasi oleh organisasi IM. Hal ini sebagaimana yang telah diakui oleh IM sendiri, bahwa ia tidak secara langsung berpartisipasi secara organisatoris, meskipun hal itu memungkinkan setiap warga negara untuk ambil bagian, termasuk di dalamnya adalah anggota IM.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ashraf Khalil, “February 1: A Wounded Fa their Figure” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and The Unmaking of an Era* (A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of the Washington Post Company, 2011), 76.

<sup>37</sup> Blake Hounshell, “February 11: Pharaoh is Dead, Long Live Pharaoh?” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of an Era* (A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011), 110.

<sup>38</sup> Ashraf Khalil, “January 25: Tear Gas on the Da y of Rage” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and The Unmaking of An Era* (A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011), 74-75.

<sup>39</sup> Ibid.

Pasca-turunnya Mubarak, keinginan IM untuk mendirikan partai politik sebagai sayap politik IM, baru terealisasi. Pada tahun 1996, IM sebenarnya sudah mendirikan partai yang disebut *Ḥizb al-Wasat*, tetapi ditolak oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pemilu. Akhirnya, pada 6 Juni 2011 IM resmi mendirikan *Ḥizb al-Ḥurrīyah wa al-‘Adālah* (Partai Kebebasan dan Keadilan/PKK). Partai baru ini dengan mengejutkan mampu tampil sebagai pemenang dan berhasil memenangi pemilihan ketua parlemen dengan menaikkan Muḥammad Sa‘ad al-Katatnī Sekjen PKK yang berhasil mendapat 399 suara dari 504 anggota Dewan.<sup>40</sup> Selanjutnya kemenangan Muḥammad Mursī (capres PKK) dalam pemilihan presiden menyempurnakan kemenangan PKK dalam pemilu presiden di Mesir mulai Mei sampai Juni 2012 dengan memperoleh suara 51,7 %.<sup>41</sup>

### **Faktor-faktor yang Mendorong Perubahan IM dari Fundamentalis menjadi Moderat**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terjadinya radikalisasi gerakan IM akibat tekanan yang bertubi-tubi dilakukan oleh penguasa. Pendekatan militeristik dalam rangka menciptakan sistem totaliter yang dipraktikkan oleh Jamāl ‘Abd al-Nâsir sebagai presiden Mesir, telah memicu lahirnya gerakan fundamentalis-radikal sebagaimana gerakan IM pada masa itu. Konsentrasi gerakan IM menjadi sarat dengan nuansa politis dengan tujuan utama merubah sistem, menggulingkan rezim, dan menegakkan pemerintahan Islam, tanpa terlibat dalam sebuah sistem politik negara Mesir. Baru pada tahun 70-an IM mulai melakukan pembenahan organisasi dan mulai menjalin koalisi dengan partai politik tertentu untuk terlibat dalam pemilu. Pergeseran ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

#### 1. Figur

Pada umumnya, model struktur yang menyerupai piramida sebagaimana struktur organisasi IM, mengharuskan sebuah kepatuhan mutlak bawahan kepada atasan. Anggota IM harus mematuhi *Mursbād*

---

<sup>40</sup> Khalid Elfiq, “Katatni Terpilih sebagai Ketua DPR Mesir” dalam [http://www.mediaindonesia.com /read/2012/01/01/293532/39/6](http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/293532/39/6) (Selasa, 24 Januari 2012)

<sup>41</sup> Anonim, “Muhammad Morsi” dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed\\_Morsi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi)

'*Ām*, sebagai satu-satunya *top leader*, sehingga gerak organisasi sangat tergantung pada sosok pemimpinnya. Dengan kata lain, maju tidaknya organisasi IM sangat ditentukan oleh kepribadian dan kapasitas keilmuan *Murshîd 'Ām*.

Al-Banna sebagai pendiri dan *Murshîd 'Ām* pertama membentuk struktur organisasi IM dengan model piramida, karena terinspirasi dari seorang kepatuhan murid (*sâlik*) terhadap guru (*murshîd*) dalam tarekat, melalui pengalaman langsung Ḥasan al-Bannâ (1906-1949). Untuk mencapai *maqâmât* tertentu dalam ajaran tasawuf, seorang *sâlik* diharuskan mematuhi amalan apa saja yang diajarkan gurunya. Kerena seorang guru (*murshîd*) sangat bertanggungjawab membimbing aktivitas spiritual murid. Sehingga, keaslian ajaran atau amalan-amalan dapat dipertanggungjawabkan ketersambungannya sampai pada Rasulullah. Oleh sebab itu, perkataan guru atau disebut *al-Aqwâl al-'Ārifîn* diposisikan sebagai pengejawantahan sunnah rasul (pewaris Rasulullah)<sup>42</sup> yang diajarkan melalui sahabat-sahabat, lalu ke *tâbi'in*, *tabi' al-tâbi'in* sampai pada gurunya.

Dengan demikian, bila IM sebagai organisasi yang terinspirasi dari hubungan murid dengan guru dalam tarekat, maka komoderatan IM hari ini tidak bisa dilepaskan dari peran seseorang yang diposisikan sebagai figur dalam organisasi tersebut.

Kemoderatan figur IM sebenarnya sudah diperkenalkan melalui sosok al-Bannâ sebagai *Murshîd 'Ām* pertama. Di akhir kepemimpinannya, al-Bannâ mulai sadar akan pentingnya membangun kompromi dengan sistem politik Mesir untuk menjaga eksistensi perjuangan IM. Ia berniat menjadi calon anggota parlemen, meski pada akhirnya ia mengurungkan niatnya karena diminta mundur oleh al-Nahas Bâshâ atas skenario Inggris.

Sikap kompromistis al-Bannâ, kemudian dilanjutkan oleh Ḥasan al-Huḍaybî (1949-1972) yang juga mementingkan cara dialog dan kompromi dengan pihak kerajaan. Hanya saja sikap al-Huḍaybî belum diterima oleh sebagian besar anggota IM, karena kondisi organisasi pasca-terbunuhnya al-Bannâ mulai tidak terkontrol, khususnya unit khusus. Gagasan al-Huḍaybî baru bisa dilanjutkan setelah ia keluar dari

---

<sup>42</sup> Sokhi Huda, *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wahidiyah* (Yogyakarta: LKiS, 2008), 65.

penjara dan merupakan momen terpenting dalam sejarah IM yang membuka jalan pembaruan di masa-masa mendatang.

Perubahan IM mulai terlihat ketika dipimpin oleh al-Tilmisânî. Figur ‘Umar al-Tilmisânî (1949-1972) dikenal sebagai sosok yang revolusioner. Ia dengan tegas mulai menggeser arah gerakan IM yang awalnya hanya tertuju pada kesalehan spiritual atau dengan meminjam istilah Hanafi terjebak dalam perdebatan “totalitas” dan “nihilitas” dengan menerima sistem Islam secara utuh atau menolak sama sekali,<sup>43</sup> ke arah politik praktis. Pergeseran ini menjadikan IM niscaya mengakui sistem kepartaian dalam politik Mesir sebagai instrumen demokrasi. Figur lain yang juga sangat berpengaruh (tanpa mengecilkan yang lain) adalah Muḥammad Mahdî ‘Âkif (2004-2010), *Murshîd ‘Âm* ketujuh. Ia terpilih mengisi posisi itu, karena dianggap mampu menjembatani kesenjangan generasi tua dan generasi muda IM, sehingga menghasilkan kolaborasi yang semakin memperkuat organisasi IM hingga sekarang.

## 2. Pembubaran al-Ikhwân al-Muslimûn

Konflik antara al-Ikhwân al-Muslimûn dengan dewan revolusi dengan al-Nâşir sebagai komando tertinggi, berujung pada pembubaran IM pada bulan Januari 1954. Peristiwa ini membuat IM berusaha mencari wadah perjuangan yang legal. Kondisi ini terjadi dalam kurun waktu 20 tahun mulai 1950 sampai awal 1970-an dan menjadi perhatian serius dari *Murshîd ‘Âm* ketiga al-Tilmisânî dan anggota generasi baru IM. Sehingga, salah satu tujuan utama al-Tilmisânî di awal kepemimpinannya adalah mengembalikan status hukum IM sebagai organisasi terlarang.

Upaya untuk mendapatkan status hukum tersebut, al-Tilmisânî mencoba mengajukan kasus ini ke pengadilan pada bulan Oktober 1977 melawan kelompok al-Nâşir yang telah membuat keputusan untuk membubarkan organisasi IM. Menurut al-Tilmisânî Dewan Revolusi tidak memiliki hak legislatif atau konstitusional yang nyata, sehingga keputusan yang dikeluarkan rezim al-Nâşir untuk melarang

---

<sup>43</sup> Hassan Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati (Yogyakarta: Islamika, 2003), 142.

IM tidak absah. Kali ini pengadilan tetap tidak mencabut status IM sebagai organisasi terlarang.

Namun, usaha untuk memperoleh status hukum terus diupayakan IM, baik ketika hubungan IM dengan pemerintah membaik maupun memburuk. Hanya saja, hubungan yang fluktuatif antara IM dengan pemerintah ini, mengakibatkan status hukum IM sebagai organisasi terlarang tidak kunjung dicabut. Dalam pencarian wadah ini muncullah gagasan untuk membangun koalisi dengan beberapa partai untuk terlibat dalam pemilu parlemen, termasuk dengan partai *al-Wafd* yang dalam sejarah berdirinya IM selalu berada dalam posisi berlawanan.

Alasan al-Tilmisâni untuk terlibat dalam pemilu bertujuan untuk mencari cara yang absah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan IM, sebagaimana yang ia katakan, “When we were released from the 1981 detention, we were in a state of near-recession. We set to looking for a lawful means to carry out our activities without troubling security or challenging the laws”<sup>44</sup> (Ketika kami dibebaskan dari penahanan 1981, kami berada dalam keadaan nyaris resesi. Kami menetapkan untuk mencari cara yang sah untuk melaksanakan kegiatan kami tanpa mengganggu keamanan atau menantang hukum).

Koalisi dengan beberapa partai mulai *al-Wafd* pada pemilu 1984, *al-‘Amal* dan *al-Ahrâr* pada pemilu 1987, dan menjadi calon independen pada pemilu-pemilu setelahnya yang dipraktikkan IM, salah satu tujuannya adalah mewadahi gerakan organisasi IM. Bahkan IM sempat membentuk *ḥizb al-Wasat*, yang diharapkan menjadi pengganti organisasi IM. Tetapi upaya inicipun gagal, karena *ḥizb al-Wasat* tidak mendapatkan izin untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak adanya wadah ini, menjadi pemicu munculnya sikap kompromi IM dengan sistem politik di Mesir.

### 3. Keterbukaan dan Kemauan untuk Belajar

Menurut Ḥasan Hanafi “orisinalitas” IM tidak berarti menutup diri dan menjaga identitas tidak harus memusuhi orang lain. Semangat ini terpelihara dengan baik dalam tubuh IM sebagai organisasi gerakan keagamaan yang berwatak reformis. Seorang Muslim kontemporer

---

<sup>44</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 379.

dalam konsep ideal al-Bannâ, haruslah mempelajari disiplin ilmu, keterampilan dan industri yang menunjang kebangkitan kontemporer.<sup>45</sup>

Dengan keterbukaan tersebut, memudahkan IM beradaptasi dengan berbagai pemikiran tanpa harus kehilangan Islam yang diyakini. Al-Bannâ sendiri meski menganggap partai sebagai pemecah belah umat Islam, tetapi pada akhirnya ia pun mulai menerima sistem pemerintahan Mesir dengan mencalonkan diri menjadi anggota parlemen. Dengan kemauan belajar yang tinggi pula, IM dapat menarik anggota dari berbagai lapisan masyarakat, seperti guru, dokter, buruh, dan lain sebagainya.

Sedangkan eksklusivitas IM menurut Ḥanafî terjadi akibat benturan dan konflik dengan Dewan Revolusi Mesir pada dekade 50-an dan 60-an, hingga melahirkan gerakan-gerakan militan.<sup>46</sup> Benturan ini menguras energi anggota IM yang melakukan perlawanan terhadap penguasa dengan tindakan-tindakan yang cenderung anarkis. Aktivisme politik IM ini tidak dilalui dengan melibatkan diri pada sistem politik, sehingga gerakannya mudah dipatahkan. Baru ketika pada masa-masa terakhir kepemimpinan al-Huḍaybî yang dilanjutkan al-Tilmisânî, IM mulai mengembangkan cara-cara kompromi dengan melibatkan diri dalam politik tanpa menggeser posisinya sebagai oposisi pemerintah yang paling konsisten.

#### 4. Masuknya Generasi Muda IM

Tidak dapat dipungkiri, bahwa perubahan karakter gerakan IM dari fundamentalis menjadi moderat tidak terlepas dari para generasi muda IM seperti al-Shâm al-'Iryân, 'Abd al-Mun'im Abû al-Futûḥ, Muḥammad al-Sayyid Ḥabîb, Muḥammad Khayrât al-Shâtir, Ibrahim al-Zafaranî dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sangat peka dan mengerti terhadap persoalan-persoalan sosial dan kenegaraan. Kemampuan mereka terbukti mampu menggeser gerakan IM yang semula hanya berbicara kesalehan spiritual, kemudian menjadi gerakan sosial dan politik.

Kompetensi yang dimiliki generasi baru, sebenarnya bukanlah hasil dari sistem kaderisasi IM, melainkan sudah terasah sejak mereka

---

<sup>45</sup> Hanafi, *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, 136.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 137.

masih kuliah. Sebagian besar mereka adalah mantan para aktivis mahasiswa angkatan 70-an yang masih muda, berpendidikan, profesional, sadar politik, dan responsif terhadap kebutuhan konstituen yang mereka wakili. Mereka juga berani bersikap kritis terhadap isu-isu yang luas seperti kebijakan pemerintah tentang kesehatan, pendidikan, masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, hutang, dan konsumsi masif.<sup>47</sup> Bahkan, mereka juga berani mengkritisi para generasi tua dan menganggap ide-idenya sudah usang dan ketinggalan jaman.

Fakta bahwa rakyat Mesir menjadi Islami tanpa harus terjadi revolusi Islam seperti di Iran adalah suatu bukti bahwa upaya untuk menciptakan masyarakat yang Islami bisa dicapai tanpa naungan Negara Islam atau bahkan sistem *khalîfah* sekalipun. Para generasi muda IM telah menyepakati bahwa mereka tidak bertujuan memerintah atau bercita-cita untuk kekuasaan dan semata-mata ingin melanjutkan dakwah kepada Tuhan. Pada Februari 2002 al-'Iryân menegaskan bahwa ajakan IM terhadap republik Islam dinilai sebagai slogan kadaluarsa.<sup>48</sup> Meskipun ungkapan al-'Iryân ini lebih pada ungkapan pribadi (bukan organisasi)—karena secara konstitusional negara Mesir adalah sebuah negara Islam dan shari'ah sebagai sumber legislasinya—tetapi ungkapan ini memperlihatkan sebuah kesiapan generasi baru IM terhadap sistem demokrasi.

Isu-isu yang mereka usung juga membuktikan, bahwa generasi baru IM berbeda dengan Islam militan. Sepanjang dekade 70-an sampai awal 90-an, adalah masa-masa meningkatnya gerakan Islam militan di Mesir. Gerakan ini seolah-olah berusaha membangun gerakan sosial yang peduli terhadap kesejahteraan sosial, tetapi faktanya adalah gerakan politik yang berusaha mengarahkan masyarakat membenci rezim dengan solusi Islam versi mereka. Mereka tidak mempercayai sistem yang ada, sehingga tidak bersedia terlibat dalam sistem politik negara Mesir. Sebagai gantinya, mereka menggunakan cara-cara kekerasan dengan membakar toko-toko video, menutup salon-salon kecantikan, mengancam menyiramkan asam bagi perempuan yang tidak berjilbab, mencegah percampuran seks, bahkan mengutuk penggunaan musik dalam acara pernikahan, dan pada akhirnya menantang sama sekali budaya Mesir.

---

<sup>47</sup> Zahid, *The Muslim Brotherhood*, 100.

<sup>48</sup> Bayat, *Pos-Islamisme*, 268.

Para generasi baru IM justru sebaliknya, mereka gigih memperjuangkan hak politiknya untuk terlibat dalam pemilu Mesir, meski terus mendapatkan tindakan represif pemerintah. Mereka seringkali keluar-masuk penjara, menjadi oposisi terbesar di parlemen, dan memobilisasi massa untuk berdemonstrasi tanpa disertai tindakan anarkis. Keberhasilan al-Tilmisânî dalam melakukan perubahan karakter IM sukses atas peran generasi baru. Mereka juga gigih melanjutkan cita-cita al-Tilmisânî untuk mendirikan partai politik sendiri, sehingga sempat membentuk *ḥiẓb al-Wasaʿ* dan pada tahun 2011 memelopori terbentuknya *Ḥiẓb al-Ḥurrîyah wa al-ʿAdâlah* (PKK).

##### 5. Sikap Toleran Mubârak terhadap Organisasi Islam

Mesir pada masa kepemimpinan Mubârak, telah mencerminkan sebuah masyarakat yang saleh mengalahkan negara-negara Islam lainnya. Pada tahun 2000 berdasarkan hasil survei *World Values Survey*, rakyat Mesir ditemukan menjadi yang paling saleh, dengan 98% mengumumkan keberagamaan mereka dibanding 82% dari rakyat Iran dan Amerika, dan 24% orang Jepang yang paling tidak agamis.<sup>49</sup> Kehidupan rakyat Mesir pada tahun 2000-an tampak lebih Islami dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kepercayaan Mesir terhadap ulama melebihi kepada kaum intelektual, khotbah Jumat selalu penuh bahkan melebihi kapasitas masjid, dan perempuan yang memakai jilbab mencapai 80% dari seluruh rakyat Mesir, meningkat jauh dibandingkan tahun 1980-an.<sup>50</sup>

Begitu juga sebuah jajak pendapat yang dilakukan Gallup pada bulan Juni 2008 menunjukkan bahwa 68% orang Mesir percaya bahwa hukum *shariʿah* harus menjadi satu-satunya sumber hukum. Sebuah survei tahun 2005 mengungkapkan, bahwa rakyat Mesir 87% menganggap agama adalah aspek yang paling penting dari identitas mereka.<sup>51</sup>

Kenyataan ini, membuat Mubârak lebih akomodatif terhadap IM sebagai ormas Islam dibandingkan para pendahulunya, walaupun tetap tidak mencabut status hukum IM. Langkah-langkah Mubârak dalam

---

<sup>49</sup> Bayat, 272.

<sup>50</sup> Ibid., 273.

<sup>51</sup> Ferry de Kerckhove, *Egypt's Muslim Brotherhood and the Arab Spring* (Calgari: Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, 2012), 5.

meminimalisir gerakan IM dan oposisi lainnya jarang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana al-Nâşr dan Sadat. IM dibiarkan terlibat dalam pemilu lewat jalur independen. Keinginan Mubârak untuk melanggengkan kekuasaannya di Mesir dan mengamankan rencana peralihan kekuasaan dari dirinya kepada anaknya, Jamal Mubarak, dengan menampilkan sikap toleran, telah membawa dampak positif bagi perkembangan IM. Di bawah Mubârak ini, agenda perubahan dalam organisasi IM berjalan cukup lancar, sehingga dalam melakukan dakwah dan aksi sosial, IM tidak begitu mendapatkan hambatan dari pemerintah. Jika ada, itu lebih pada ranah politik.

Pada dasarnya, Mubârak berada dalam posisi dilematis untuk menentukan sikap yang tepat terhadap organisasi IM. Menurut 'Alâ al-Dîn 'Arafat sikap dilematis ini antara pemerintah merasa perlu menghancurkan IM sebagai oposisi di satu sisi dan merasa penting memelihara IM untuk mengantisipasi munculnya kelompok Islam radikal seperti pada masa Sadat, pada sisi yang lain. Sikap pertama bagi pemerintah sangat penting dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pengaruh politik IM dalam dua masa ini semakin meningkat dan mengancam kekuatan rezim yang ingin tetap menjaga dominasinya.
- b. Pemerintah ingin membatasi kegiatan anggota parlemen IM untuk menjamin proses amandemen konstitusi tanpa adanya oposisi kuat di parlemen yang mengancam agenda pemerintah tersebut.
- c. Pemerintah bertekad untuk menjamin suksesi presiden berjalan dengan tenang, baik pada tahun 2011 atau lebih cepat. Jika Mubârak mengundurkan diri, pemerintah berharap proses peralihan dari Mubârak kepada Jamâl Mubârak berjalan tanpa gangguan IM.

Sedangkan sikap yang kedua, pemerintah perlu tetap menjaga IM sebagai organisasi Islam moderat. Bila IM ini dihapus, maka pemerintah akan menghapus kelompok Islam moderat yang nantinya akan menyebabkan lahirnya kelompok Islam radikal.<sup>52</sup> Nampaknya Mubârak benar-benar menyadari kesalahan Anwar Sadat atas tindakan represifnya yang menyebabkan dirinya ditembak mati. Apalagi sejarah panjang perjalanan IM membuktikan bahwa organisasi ini tidak mudah dihancurkan. Akhirnya, kompromi dua sikap ini, pemerintah tetap

---

<sup>52</sup> Ala al-Din Arafat, *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), 176-177.

berusaha melemahkan organisasi IM, tetapi dengan cara tidak langsung, seperti perang isu melalui media, menciptakan permusuhan antara IM dang orang pro-pemerintah dan lain sebagainya. Kalaupun Mubârak dalam hal tertentu mengabil tindakan represif, itu hanya sebatas memenjarakan.

## **Langkah-langkah IM dalam Menyukkseskan Perubahan IM dari Fundamentalis menjadi Moderat**

### 1. Mengembalikan strategi gerakan IM pada periode awal

Strategi gerakan IM sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah *buttom up*, yaitu dimulai dengan perbaikan individu, keluarga, masyarakat, pembebasan tanah air, perbaikan pemerintah, pengembalian peran internasional bagi umat Islam dengan cara memerdekakan, menyatukan, dan mengumumkan *kbilâfah*. Strategi seperti ini sempat dilupakan oleh anggota IM, ketika gerakan mereka hanya diperuntukkan untuk melawan rezim al-Nâsir. Pada tahun 1970-an di saat kondisi organisasi hancur akibat tindakan represif rezim al-Nâsir, al-Tilmisânî merumuskan langkah-langkah untuk membangun kembali organisasi. Langkah pertama yang dilakukan al-Tilmisânî adalah mengembalikan strategi gerakan IM sebagaimana pada masa al-Bannâ, yakni perubahan dari bawah ke atas (*buttom up*).

Tetapi pada masa al-Tilmisânî tersebut, strategi gerakan IM tidak sepenuhnya sama dengan masa al-Bannâ. IM berusaha melakukan beberapa perbaikan dengan model *buttom up* dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, sehingga tahapan strategi di atas dapat dibagi dua yaitu ranah sosial dan politik. Pada ranah sosial, strategi IM berusaha melakukan hal yang sama seperti pada masa al-Bannâ yaitu memperbaiki individu, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pada ranah politik, perbaikan tanah air, pemerintahan, dan akhirnya pengembalian peran internasional Islam dalam wujud *kbilâfah* yang menjadi tujuan gerakan IM pada masa al-Bannâ, tidak lagi menjadi fokus gerakan IM.

Dalam ranah sosial, IM membangun kembali kepeduliannya terhadap isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat umum, seperti masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Gerakan ini ternyata dengan cepat mengembalikan eksistensi IM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. IM dengan mudah menarik

perhatian berbagai lapisan masyarakat, mulai perhimpunan profesional Mesir seperti dokter, insinyur, ahli farmasi, pengacara, pedagang, profesor, sampai mahasiswa.

Dengan modal mendapat kepercayaan publik, IM mampu melakukan banyak hal termasuk menciptakan perusahaan investasi Islam dengan bunga 20 persen, sehingga mampu mensubsidi anggotanya yang berpendapatan rendah.<sup>53</sup> Contoh lain yang paling nyata dari kepedulian IM terhadap persoalan sosial adalah ketika terjadi gempa bumi pada tahun 1992 di Kairo. Mereka mampu membangun layanan medis gratis bagi para korban gempa. Tidak hanya itu mereka juga memberikan bantuan makanan, pakaian, selimut, dan menyumbangkan 1.000 dolar kepada setiap keluarga tunawisma di kota. Sebaliknya, pemerintah justru lebih lambat dibandingkan IM. Kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial yang dilengkapi dengan mobilitas yang tinggi, menjadi modal utama IM untuk terus mempromosikan diri sebagai organisasi yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masalah sosial.<sup>54</sup>

Gerakan *buttom up* tersebut, membuat IM tidak saja membuat dirinya dekat dengan masyarakat dan menjadi populer karenanya. Lebih dari itu, IM dapat memahami keberagaman masyarakat Mesir secara langsung. Kenyataan ini yang mengantarkan IM menjadi organisasi yang lebih toleran terhadap perbedaan daripada sebelumnya.

## 2. Melibatkan Diri dalam Percaturan Politik Mesir

Keterlibatan IM dalam pemilu dimulai ketika Mesir dipimpin oleh Mubârak. Pada Pemilu 1984, IM ternyata mampu membangun koalisi dengan partai *al-Wafd*. Ini menjadi pengalaman pertama IM dalam mengikuti pemilu. Koalisi ini cukup unik, pasalnya bukan antara partai satu dengan lainnya, melainkan koalisi partai dengan organisasi yang masih dalam status terlarang. Kebesaran organisasi IM nampaknya menjadi daya tarik bagi beberapa partai politik di Mesir untuk mendulang suara, sehingga *al-Wafd* yang sebelumnya menjadi lawan IM tetap bersedia bekerja sama. Sedangkan dari sisi IM, koalisi ini adalah terobosan baru untuk memulai mengesampingkan konfrontasi IM dengan *al-Wafd* di masa lalu. Usaha ini ternyata tidak

---

<sup>53</sup> Bayat, *Pos-Islamisme*, 60.

<sup>54</sup> Arafat, *The Mubarak Leadership*, 172.

sia-sia, koalisi IM dan *al-Wafd* pada pemilu 1984 sukses mengamankan 58 kursi di parlemen, delapan di antaranya diisi orang-orang IM.

Selanjutnya pada pemilu 1987, IM kembali ikut-serta dalam suksesi Mesir. Kali ini IM membangun koalisi dengan partai *al-'Amal* dan *al-Abrâr*. Koalisi ini mampu mengamankan 36 kursi, jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya yang hanya delapan kursi. Jumlah anggota IM di parlemen jauh semakin meningkat pada pemilu 1995 dengan mengamankan 170 kursi. Ini adalah perolehan asli IM pada pemilu 1995 tanpa koalisi dengan partai yang lain. Jalur yang dipilih bukanlah parpol, tetapi jalur independen. Fakta ini membuktikan, bahwa IM semakin dicintai rakyat Mesir dan sebaliknya legitimasi pemerintah melalui NDP dan partai politik lainnya semakin menurun.

Keikutsertaan IM dalam pemilu, secara otomatis dapat diartikan telah meninggalkan cita-cita mendirikan kembali *kebilâfah*. Padahal sebelumnya, partai politik bagi IM dipahami sebagai salah satu strategi Barat untuk memecah umat Islam. Keterlibatan IM mengindikasikan, bahwa ia tengah berusaha menggeser pandangan klasik itu. Karena dalam sistem demokrasi, suksesi kepemimpinan yang dikehendaki haruslah melalui pemilu, di mana partai politik menjadi kendaraanya. Dengan begitu, keberadaan partai politik menjadi salah satu syarat bagi tegaknya bangunan demokrasi. Oleh karena itu, keterlibatan IM dalam pemilu merupakan bentuk pengakuan dan penerimaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Ini bisa dijadikan bukti lebih lanjut, bahwa dari strategi gerakan politik IM tengah berusaha untuk keluar dari sekat-sekat ideologis yang kaku.

### 3. Mengadaptasikan Nilai-nilai Islam dengan Nilai-nilai Demokrasi

Konsekuensi dari upaya pembaruan gerakan politik IM, tentu saja menyaratkan adanya pengadaptasian beberapa nilai-nilai yang telah diyakini dengan nilai-nilai baru. Adaptasi ini sangat penting bagi IM, supaya pembaruan yang dilakukan tidak menghilangkan karakteristik IM sebagai organisasi masyarakat Islam. Dalam proses adaptasi ini, bukan tidak mungkin akan mempertemukan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai demokrasi.

Dialektika nilai-nilai Islam dengan demokrasi dapat ditemukan dalam “statement democracy” yang dikeluarkan IM yang meliputi

empat isu pokok yaitu: non-Muslim dan gender, hubungan agama dengan politik, kekerasan dan politik, dan hak asasi manusia.<sup>55</sup>

a. Isu non-Muslim dan gender

Dalam hal perlindungan hak asasi, konstitusi baru tahun 2012 melarang semua bentuk eksploitasi manusia dan perdagangan seks.<sup>56</sup> Dari sini dapat dikatakan, pemikiran IM terhadap isu non-Muslim dan gender adalah sebagai berikut:

1. Non-Muslim

IM sejak awal mempunyai sikap tegas terhadap agama lain. Artinya dalam konteks ini, sikap pluralisme IM sudah dimulai sejak pendiri dan *Murshîd 'Âm* pertama, yakni Ḥasan al-Bannâ. Sikap klasik IM tentang posisi non-Muslim nampaknya tetap dipertahankan hingga kini.

Sebelum IM memenangi pemilu melalui sayap politiknya PKK, IM sudah mengeluarkan sebuah pernyataan sebagai berikut:

*We the Muslim Brothers always say that we are advocates and not judges, and thus we do not ever consider compelling anybody to change his belief, in accordance with God's words: "No compulsion in religion". Our position regarding our Christian brothers in Egypt and the Arab world is explicit, established and known: they have the same rights and duties as we do. . . . Whoever believes or acts otherwise is forsaken by us.*<sup>57</sup> (Kami al-Ikhwân al-Muslimûn selalu mengatakan bahwa kita adalah advokat dan bukan hakim, dan dengan demikian kita tidak pernah mempertimbangkan untuk menarik siapa pun untuk mengubah keyakinannya, sesuai dengan firman Allah: "Tidak ada paksaan dalam agama", posisi kami tentang saudara-saudara Kristen kita di Mesir dan dunia Arab secara eksplisit, sudah baik dan dikenal: mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti yang kita lakukan. . . . Siapapun yang percaya atau bertindak sebaliknya akan ditinggalkan oleh kami).

Sikap tersebut dibangun sebagai kampanye IM untuk menunjukkan dirinya layak disebut organisasi yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam militan pada tahun 1980-an sampai 1990-an.

---

<sup>55</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 384.

<sup>56</sup> Michael Lipin, "Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama" dalam <http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237> (12 Desember 2012)

<sup>57</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis Of The Egyptian Muslim Brothers*, 385.

Gerakan Islam militant terkait isu ini, pada tingkat nasional, mereka menyerang gereja-gereja Koptik, perkumpulan-perkumpulan, individu-individu dan properti. Pada saat itu, tindakan kekerasan terhadap umat Kristen meningkat dari 52 insiden selama tahun 1970-an menjadi 111 selama 1980-an hingga awal 1990-an, termasuk 46 pembunuhan selama 1992-1994. Bagi kelompok militan, keberadaan agama Kristen mengganggu penegakan agama dan Negara Islam.<sup>58</sup> Yang membedakan kelompok militan dengan IM adalah watak gerakan mereka yang kaku, mereka ketat dalam mengatur cara hidup, dan mempunyai padangan bahwa ada perbedaan mutlak antara cita-cita Islam dan realitas kontemporer.<sup>59</sup>

Sikap toleransi IM terhadap non-Muslim yang dibangun sejak dulu, sangat nampak tidak berubah hingga kini. Sebagaimana telah diketahui, implementasi dari konstitusi tentang hak asasi di atas, bahwa terdapat tokoh-tokoh non-Muslim yang masuk dalam pemerintahan Mesir baru yang dipimpin Presiden Mursi. Terobosan Mursi menjadikan dirinya disebut sebagai tokoh paling berpengaruh ke-4 di dunia versi majalah Time.

## 2. Gender

Sikap IM terhadap isu kesetaraan gender di masa lalu, dapat diistilahkan sebagai bias gender. Perbedaan kedudukan laki-laki dan hak-haknya yang dikutip dari pemikiran klasik pada waktu itu dipahami sebagai *mainstream* mayoritas umat Islam, sehingga al-Tilmisânî sendiri pada tahun 1970-an belum keluar dari pemikiran klasik tersebut dengan mengatakan:

“I do not like to talk about women. Modern people may find this shameful, or cowardly, but I want nothing to do with modern theories and the equality of men and women. I still believe that a man is a man and a woman is a woman and that’s why God created her. . . . A woman who believes that she is equal to a man is a woman who has lost her femininity, virtue and dignity”<sup>60</sup> (Saya tidak suka berbicara tentang wanita. Orang modern mungkin menemukan ini memalukan, atau pengecut, tapi aku ingin tidak ada hubungannya dengan teori-teori

---

<sup>58</sup> Bayat, *Post Islamisme*, 257-258.

<sup>59</sup> Katerina Dalacoura, *Islam, Liberalism, Human Right* (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2003), 129.

<sup>60</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 383.

modern dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Saya masih percaya bahwa seorang pria adalah seorang pria dan seorang wanita adalah seorang wanita dan itulah mengapa Tuhan menciptakan dirinya. . . . Seorang wanita yang percaya bahwa dia sama dengan pria adalah wanita yang telah kehilangan kewanitaannya, kebajikan dan kemuliaannya).

Bagitu juga dalam pandangan al-Bannâ. Ia dengan tegas menolak keterlibatan perempuan yang menyibukkan diri di parlemen, partai politik dan urusan publik lainnya. Al-Bannâ menolak konsep kesetaraan yang dibawa Barat dengan menganggapnya sebagai alat propaganda yang dibangun di atas hawa nafsu. Sikap al-Bannâ ini memang tidak secara langsung ditujukan pada konsep gendernya, melainkan karena kebenciannya terhadap kolonialis Barat yang dianggap menggerogoti peradaban Islam. Tetapi pandangan bahwa hak dan kewajiban laki-laki berbeda dengan perempuan adalah pandangan yang mewarnai hampir seluruh anggota IM pada waktu itu.

Pada dasarnya, al-Bannâ juga menghormati hak-hak perempuan, karena setiap harinya di Ismailiyah, al-Banna juga mengajar perempuan. Bahkan al-Bannâ juga mempunyai hubungan baik dengan tokoh perempuan yang terkenal di Mesir awal 1990-an, yakni Labibâ Aḥmad. Labibâ diidentifikasi oleh al-Bannâ sebagai sosok karismatik yang mampu mengarahkan gerakan Islam dan membimbing kebangkitan agama Mesir. Keduanya juga pernah tergabung dalam Association of Muslim Youth,<sup>61</sup> sebelum al-Bannâ pindah ke Ismailiyah. Mungkin kekaguman terhadap Labiba ini yang mendasari al-Bannâ mendirikan al-Akhwât al-Muslimât (cabang IM untuk perempuan). Sosok al-Bannâ sendiri lebih dikenal *modernistic outlook* (pandangan modern) dan berbeda dengan Sayyid Quṭb yang dikenal *revolutioner approach* (pendekatan revolusioner).<sup>62</sup>

Sikap IM hari ini tentang kesetaraan gender semakin tegas sebagaimana dalam pembukaan konstitusi yang baru tahun 2012, menyatakan: “Mesir menaati prinsip persamaan untuk semua warga negara, perempuan dan laki-laki, tanpa diskriminasi atau nepotisme

---

<sup>61</sup> Beth Baron, *Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics* (California: University of California Press, 2005), 209.

<sup>62</sup> Meir Hatina, *Identity Politics in the Middle East: Liberal Thought and Islamic Challenge in Egypt* (London: Tauris Academic Studies, 2007), 98.

atau perlakuan yang memihak, baik dalam hal hak maupun kewajiban”. Bagian utama dokumen baru juga mengandung dua pasal yang melarang negara melanggar hak dan kesempatan yang sama bagi warga negara.<sup>63</sup>

Kehadiran konstitusi yang baru, membuktikan bahwa IM semakin menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang sangat menghargai hak-hak perempuan. Pencalonan Sabaq al-Sakkârî untuk menjadi ketua PKK<sup>64</sup> menjadi bukti utama bahwa perempuan dalam konteks publik bagi IM setara dengan laki-laki. Contoh lain adalah dukungan IM terhadap pencalonan Jihânî al-Halafâwî, seorang dokter perempuan, sebagai anggota parlemen dalam pemilu tahun 2000. Menurut IM, “Membatasi hak wanita Muslim untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, melemahkan peluang memenangkan calon Islam”. Bagi IM ayat al-Qur’ân yang menjelaskan tentang kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, menerangkan kedudukan dalam keluarga bukan publik.<sup>65</sup>

Kendati demikian, perubahan sikap IM terhadap Isu gender, menunjukkan formula tersendiri yakni tetap didasarkan pada shari’ah, bukan kesetaraan gender sebagaimana Turki dan Prancis yang melarang penggunaan simbol-simbol agama. Pasca-jatuhnya Mubârak, terdapat perubahan yang menarik di Mesir dengan munculnya Fâtimah Nâbil sebagai presenter perempuan pertama yang memakai jilbab. Ia muncul di sebuah TV milik pemerintah Mesir membacakan buletin berita siang, Minggu 2 September 2012 lalu. Sejak di bawah rezim Mubarak, presenter perempuan dilarang memakai jilbab.<sup>66</sup>

### 3. Isu Hubungan Agama dan Politik

Persoalan ini sebenarnya adalah problem umum yang dihadapi oleh umat Islam semenjak runtuhnya sistem *kehilâfah* Turki Uthmânî dan masuknya gagasan sekularisasi yang dibawa bangsa kolonial Barat. IM terbentuk sebagai organisasi (sebelum tahun 1970-an) yang

<sup>63</sup> Lipin, “Konstitusi Baru Mesir”.

<sup>64</sup> Abu Ghazzah, “Aktivis Perempuan Ikhwan Calon Presiden FJP” dalam <http://al-ikhwan.net/akhbar-ikhwan> (4 Oktober 2012)

<sup>65</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 383.

<sup>66</sup> Noname, “Fatimah Nabil, Presenter Berjilbab Pertama di Mesir” dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/09/03/115427279> (Senin, 03 September 2012)

berusaha melawan pengaruh Barat dengan mendambakan kebangkitan *kebilâfah*, sehingga perjuangannya harus dimulai dengan membangun nasionalisme untuk melepaskan negara-negara Arab dari tangan penjajah. Setelah merdeka diupayakan membentuk persatuan Arab, hingga akhirnya menyatukan kembali umat Islam di seluruh dunia di bawah pemerintahan Islam dalam naungan *kebilâfah*.

Pada perkembangannya, khususnya saat ini hubungan agama dan politik dalam pemikiran IM tidak lagi memperlihatkan keinginan kuat membangkitkan *kebilâfah*. Ia lebih mendukung sistem yang berlaku di Mesir, tetapi tetap memberikan peran Islam sangat besar sebagai sumber hukum negara. Ini bisa dilihat dari konstitusi baru yang menetapkan Islam sebagai agama resmi di Mesir dan hukum Islam atau *shari'ah*, sebagai sumber utama legislasi. Konstitusi 2012 untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir yang mendefinisikan *shari'ah*. Dalam dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip *shari'ah* termasuk bukti, peraturan, yurisprudensi dan sumber-sumber yang diterima oleh Islam Sunni, sekte Islam mayoritas di Mesir.<sup>67</sup>

Selain itu, dalam konstitusi tersebut juga memberikan wewenang yang belum pernah ada sebelumnya kepada al-Azhar, universitas agama paling dihormati dalam kelompok Islam Sunni, dengan menyatakan bahwa semua hal berkaitan dengan *shari'ah* harus dikonsultasikan kepada para akademisi di lembaga pendidikan tersebut.

Dokumen tersebut, memperlihatkan bahwa IM telah mendukung nasionalisme. Hal ini dipertegas dalam visi komprehensif organisasi IM dengan menjelaskan;

IM merasa terhormat dengan nasionalismenya sebagai umat yang utama dan baik, serta memiliki berbagai keistimewaan dan sejarahnya sendiri, sampai gambaran tersebut terpatri di dalam jiwa putra-putranya, sehingga mereka menebus kemuliaan dan kehormatan itu dengan darah dan nyawa mereka, bekerja demi kebaikan tanah air ini (Mesir), kejayaan, dan kebahagiaannya.<sup>68</sup>

Dengan demikian IM tetap berusaha membangun sistem Islam, tetapi berwajah demokratis.

---

<sup>67</sup> Lipin, "Konstitusi Baru Mesir"

<sup>68</sup> Abu Anisa, "Visi peradaban komprehensif Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimun" dalam <http://al-ikhwan.net/minkutubil-ikhwan> (Selasa, 18 Desember 2012)

#### 4. Kekerasan dan Politik

Penggunaan kekerasan yang dulu sempat menjadi pilihan gerakan IM, disebabkan kerasnya situasi yang dihadapi IM pada masa lalu. Pilihan gerakan seperti ini ternyata dalam terminologi pemikiran keagamaan disebut sebagai organisasi Islam militan.

Padahal dalam pemikiran al-Bannâ, penggunaan kekerasan bukanlah pilihan utama. Konsep jihad bagi al-Bannâ tidak selalu berarti perang, tetapi disesuaikan dengan konteksnya. Begitu juga dengan penggunaan kekuatan, bagi al-Bannâ bukanlah pembunuhan politik, melainkan kekuatan aqidah dan iman, kekuatan persatuan dan kekompakan, dan yang terakhir adalah kekuatan otot dan persenjataan. Dari sini posisi kekuatan persenjataan berada dalam posisi terakhir dan bisa dipahami sebagai pilihan terakhir.

Dalam pemikiran Sayyid Quṭb juga tidak ditemukan pemikiran-pemikiran yang menghalalkan penggunaan kekerasan. Menurutnya penggunaan kekerasan hanya untuk membela diri.<sup>69</sup> Ungkapan Quṭb memperlihatkan, kekerasan yang dilakukan IM pada masa lalu sebenarnya lebih karena adanya tindakan represif pemerintah terhadap IM selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak adanya figur yang dapat menggantikan al-Bannâ pasca-kematiannya mengakibatkan koordinasi dan konsolidasi organisasi menjadi lemah. Unit khusus akhirnya semakin tidak terkendali. Baru setelah tahun 1970-an, IM mulai membangun komitmen untuk terlibat dalam pemilu. Itu berarti tindakan kekerasan yang biasa dilakukan IM sebagai organisasi oposisi yang bermain di luar sistem, telah berakhir.

#### 5. Isu Hak Asasi Manusia

Isu non-Muslim dan gender yang disikapi IM dengan baik tanpa dibeda-bedakan, menjadi bukti kepeduliannya terhadap HAM. Hal itu, dipertegas lagi dengan terobosan Presiden Muḥammad Mursî dalam mengakomodasi orang-orang non-Muslim untuk duduk di pemerintahan. Al-‘Iryân sendiri menjelaskan, “God created humans with differences, so plurality is the normal state of things. The problem is how to organize these differences without turning them into chaos, and that’s why you need several parties”<sup>70</sup> (Allah menciptakan manusia

<sup>69</sup> Sayyid Quṭb, *Limâdha ‘A‘damîni* (t.t.: t.p., 1969), 16.

<sup>70</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 384.

dengan perbedaan, sehingga pluralitas adalah keadaan normal. Masalahnya adalah bagaimana untuk mengatur perbedaan-perbedaan tanpa mengubahnya ke dalam kekacauan, dan itulah mengapa anda membutuhkan beberapa pihak).

Sikap IM terhadap HAM ini, ternyata juga didasarkan pada ajaran al-Qur'ân tentang persamaan manusia. Menurut mereka, "Islam has been and still is the only intellectual and political model that honors man and humanity, disregarding differences in language, color, and race"<sup>71</sup> (Islam telah dan masih merupakan model secara intelektual dan politik yang menghormati manusia dan kemanusiaan, mengabaikan perbedaan bahasa, warna kulit, dan ras).

Tafsir klasik terhadap ajaran Islam tentang persamaan manusia sebagai dalil dalam melakukan perlindungan terhadap setiap hak warga negara tidak lagi diperdebatkan. Hanya saja ketika HAM harus teraktualisir dalam ranah politik, konsep HAM versi Barat dengan tradisi politik Islam sangat berbeda. Dalam tradisi demokrasi yang diperkenalkan Barat, kedaulatan tertinggi adalah milik manusia sebagai wujud dari hak memilih sebagaimana termaktub dalam piagam PBB 1948.<sup>72</sup> Sedangkan dalam tradisi politik Islam tidak dikenal istilah kedaulatan manusia, karena kedaulatan hanya milik Allah.

Kontradiksi antara tradisi politik Barat dan Islam berusaha dijembatani oleh IM dengan mengakui bahwa kedaulatan manusia tidak bertentangan dengan Islam. Pandangan IM mengenai hal ini adalah: "The legitimacy of government in a Muslim society should be derived from the consent and choice of the people . . . people have the right to invent different systems, formulas, and techniques that suit their conditions, which definitely would vary according to time, place, and living conditions"<sup>73</sup> (Legitimasi pemerintah dalam masyarakat Islam

---

<sup>71</sup> Ibid., 386.

<sup>72</sup> Dalam piagam PBB 1948 pasal 21: 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas, 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya, dan 3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

<sup>73</sup> al-Ghabashy, *The Metamorphosis*, 386

harus berasal dari persetujuan dan pilihan masyarakat...orang memiliki hak untuk menciptakan sistem yang berbeda, formula, dan teknik yang sesuai dengan kondisi mereka, yang pasti akan berbeda menurut waktu, tempat, dan kondisi kehidupan).

Pembelaan IM terhadap HAM dinilai oleh berbagai kalangan bahwa tujuannya melindungi hak-hak mereka sendiri, sebagai individu dan sebagai organisasi. IM juga dinilai berniat menghadirkan gambaran gerakan Islam moderat dan terhormat yang mengemban prinsip internasional hak asasi manusia. Reaksi sehari-hari IM sendiri terhadap isu-isu yang diperjuangkan, para pengamat politik dan aktivis mahasiswa setuju bahwa IM memahami konsep HAM masih dangkal. Penilaian itu didasarkan pada sikap paradoks IM yang menghormati hak-hak minoritas non-Muslim dalam masyarakat Muslim, tetapi Kristen dan Yahudi khususnya digambarkan secara inheren memusuhi Islam.<sup>74</sup>

Keempat isu pokok tersebut, bila disederhanakan ke dalam sebuah table sebagai berikut:

Variable Pembeda	IM Sebelum 1970	IM Pasca-1970 hingga sekarang	Skala
Hak-hak non-Muslim	Islam adalah agama yang secara tegas mengajarkan toleransi	Muslim dan non-Muslim mempunyai hak yang sama	Dekat ke liberal
	Yahudi dan Kristen dianggap musuh Islam	Tetap kritis terhadap kebijakan Yahudi dan Barat.	Dekat ke fundamentalis
	Tidak boleh menjadi top leader dalam pemerintahan	Tidak boleh menjadi <i>top leader</i> dalam pemerintahan	Dekat ke fundamentalis
Gender	Perbedaan hak dan posisi antara laki-laki dan perempuan satu paket dengan perbedaan kewajiban baik dalam wilayah domestik maupun publik	Laki-laki lebih tinggi dalam wilayah domestik dan sama dalam wilayah publik dan boleh memakai atribut Islami	Moderat

<sup>74</sup> Dalacoura, *Islam, Liberalism, Human Right*, 128.

Politik	Kedaulatan di tangan Tuhan (teokrasi)	Kedaulatan di tangan manusia (demokrasi)	Dekat ke liberal
	Anti-Partai Politik	Mendirikan Partai Politik	Dekat ke liberal
	Pemerintahan Islam	Pemerintahan demokratis	Dekat ke liberal
	Tujuan akhir pemerintahan Islam kebangkitan khilafah	Tujuan pemerintahan menciptakan masyarakat yang islami	Moderat
	Al-Qur'ân dan sunnah sebagai konstitusi	Al-Qur'ân dan sunnah sebagai konstitusi Menerima hukum selain	Dekat ke fundamentalis
Tidak menerima hukum selain Islam	Islam dan menolak bila bertentangan dengan sharf'ah	Moderat	
Hak Asasi Manusia	Agama satu-satunya sebagai pembeda	Pluralitas agama adalah hal yang normal	Lebih dekat ke liberal

Berdasarkan tabel di atas, IM tengah berusaha untuk tidak mempertentangkan antara Islam dan demokrasi, meski dalam beberapa hal harus menunjukkan sikap ambivalen, antara sikap fundamentalis dan liberal. Tetapi, satu hal yang penting di sini adalah kemampuan IM dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman yang memicu proses dialektika antara nilai-nilai Islam dengan demokrasi. Usaha ini cukup membuahkan hasil dan justru membuat IM jauh lebih maju dan berkembang sejak didirikan pada 1928 yang lalu, walau masih tetap membutuhkan beberapa penyempurnaan terkait beberapa sikap ambivalen atau bahkan terjadi kontradiksi antara kebijakan dan praktik.

Oleh karena itu, usahaya yang dilakukan IM untuk menelusuri nilai-nilai Islam yang sejalan dengan demokrasi seperti *al-shûrâ*, *al-'adâlab*, *al-musâwâh*, *al-hurrîyah*, dan lain sebagainya, merupakan capaian yang cukup baik bagi IM dalam rangka menggeser ideologi fundamentalis menjadi moderat. Menurut Bayat yang penting bukan pertanyaan apakah Islam sesuai dengan demokrasi, melainkan apakah

umat Islam mampu beradaptasi.<sup>75</sup> Bila pertanyaan ini harus dijawab, maka IM adalah salah satu organisasi Islam yang berhasil beradaptasi dengan cara-cara yang baik dengan mewujudkan negara Islam berwatak Demokratis.

### **Catatan Akhir**

Perubahan al-Ikhwân al-Muslimûn dari fundamentalis menjadi moderat, bukanlah sebuah perubahan yang lahir dari ruang hampa, melainkan lahir dari sebuah refleksi terhadap perjalanan IM yang sangat panjang. Berbagai masalah dan cobaan, serta berbagai upaya kegagalan IM untuk merealisasikan tujuan-tujuan di awal berdirinya, mengantarkannya pada sebuah kenyataan yang menuntut dirinya harus beradaptasi. Tuntutan adaptasi untuk menjaga eksistensi ini, tentu saja disebabkan oleh beberapa hal dan membutuhkan langkah-langkah yang tepat, supaya perubahan tersebut tidak hanya dibangun sebagai bentuk imitasi, tetapi lebih didasarkan pada pilihan sadar atas nilai-nilai masa lalu yang masih kompetibel. Berikut hasil kesimpulan peneliti terhadap perubahan IM dari Islam fundamentalis menjadi moderat yang terangkum dalam dua bahasan.

### **Daftar Rujukan**

- al-Qardhawi, Yusuf. *70 Tahun Ikhwan Muslimin: Kilas Balik Dakwah, Tarbiyah, dan Jihad*, terj. Mustolah Maufur. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Anisa, Abu. “Visi peradaban komprehensif Jama‘ah al-Ikhwan al-Muslimun” dalam <http://al-ikhwan.net/minkutubil-ikhwan> (Selasa, 18 Desember 2012)
- Anonim. “Fatimah Nabil, Presenter Berjilbab Pertama di Mesir” dalam [http://www.tempo.co/read/news/2012/09/03/115427279/Dia\\_kses\\_Senin,03\\_September\\_2012](http://www.tempo.co/read/news/2012/09/03/115427279/Dia_kses_Senin,03_September_2012)
- Anonim. “Husni Mubarak” dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Husni\\_Mubarak](http://en.wikipedia.org/wiki/Husni_Mubarak) (April 2013)
- Anonim. “Muhammad Morsi” dalam [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed\\_Morsi](http://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Morsi)
- Arafat, Ala al-Din. *The Mubarak Leadership and Future of Democracy in Egypt*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

---

<sup>75</sup> Bayat, *Pos-Islamisme*, 7-8.

- Baron, Beth. *Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics*. California: University of California Press, 2005.
- Bayat, Asef. *Pos-Islamisme*, terj. Faiz Tajul Millah. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Choueiri, Youssef M. *Islamic Fundamentalism*. Boston: A Division of G.K. Hall & Co, 1990.
- Dalacoura, Katerina. *Islam, Liberalism, Human Right*. London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2003.
- Elfiq, Khalid. “Katatni Terpilih sebagai Ketua DPR Mesir” dalam <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/01/01/293532/39/6>, Selasa, 24 Januari 2012.
- Ghozzah, Abu. “Aktivis Perempuan Ikhwan Calon Presiden FJP” dalam <http://al-ikhwan.net/akhbar-ikhwan>, 4 Oktober 2012.
- Hanafy, Hassan. *Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam*, terj. Kamran As’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Hatina, Meir. *Identity Politics in the Middle East: Liberal Thought and Islamic Challenge in Egypt*. London: Tauris Academic Studies, 2007.
- Hounshell, Blake. “February 11: Pharaoh is Dead, Long Live Pharaoh?” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of an Era*, A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011.
- Huda, Sokhi. *Tasawuf Kultural: Fenomena Shalawat Wabidiyah*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Iqbal dkk, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kenner, David. “October 2010: The Death of Egypt’s Free Press” dalam *Revolution in the Arab World: Tunisia, Egypt, and the Unmaking of an Era*, A Special Report From Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011.
- Kerckhove, Ferry de. *Egypt’s Muslim Brotherhood and the Arab Spring*. Calgary: Canadian Defence & Foreign Affairs Institute, 2012.
- Khalil, Ashraf. “February 1: A Wounded Fa their Figure” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and The Unmaking of an Era*. A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of the Washington Post Company, 2011.

- . “January 25: Tear Gas on the Day of Rage” dalam *Revolution in The Arab World: Tunisia, Egypt, and The Unmaking of An Era*. A Special Report from Foreign Policy: Published by the Slate Group, a division of The Washington Post Company, 2011.
- Lipin, Michael. “Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama” dalam <http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237> (12 Desember 2012)
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu* terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani Press, Vol 1, 1997.
- Mona al-Ghabashy, *The Metamorphosis of the Egyptian Muslim Brothers*. United States of America: Cambridge University Press, 2005.
- Said, Imam Ghazali. *Ideologi Kaum Fundamentalis: Pengaruh Pemikiran Politik al-Maududi Terhadap Gerakan Jama'ah Islamiyah Trans Pakistan-Mesir*. Surabaya: Diantama, 2003.
- Zahid, Muhammad. *The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis: The Politics of Liberalisation and Reform in the Middle East*. London: Tauris Academic Studies, 2010.